

No :12/Surat Terbuka_JSKK/X/07

Hal : **Sumpah Pemuda dan Pelanggaran HAM (Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM)**

Kepada Yth
Presiden RI
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Di-

Jakarta

Salam Perjuangan,

Kami Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM masa lalu (JSKK), tidak pernah berhenti mengirimkan surat kepada Bapak Presiden RI, dan telah tigapuluh (37) kali kami melakukan aksi Diam Hitam Kamisan di depan Istana, semua kami lakukan agar perjuangan kami untuk menuntut keadilan atas hak-hak kami sebagai korban pelanggaran HAM dapat segera terwujud..

Tanggal 28 Oktober, Tahun 1928 yang lalu merupakan sejarah paling berharga bagi bangsa ini. Dimana, para pemuda-pemudi dari berbagai pelosok bangsa ini membulatkan tekad untuk membuat kesepakatan bersama melalui Kongres Pemuda II untuk menciptakan satu persatuan yang kokoh. Para pemuda-pemudi yang terdiri dari Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatra, Jong Batak dan para pemuda-pemudi lainnya menyatakan ikrar bersama; *“kami putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, tanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia”*

Dengan terciptanya persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaanya. Hari ini,. Sumpah pemuda sebagai api perjuangan bangsa Indonesia harus kita kobarkan kembali, dengan mewujudkan cita-cita para tokoh bangsa untuk membebaskan rakyat dari segala penindasan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Kami para korban pelanggaran HAM di seluruh Indonesia, sampai hari ini masih terus berjuang mendapatkan Hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan yang sampai saat ini belum kami dapatkan. Sebab keadilan di negara ini lebih memihak kepada para pelaku kejahatan HAM. Hal ini terlihat dari bebasnya para pelanggar HAM dalam kasus Tanjung Priok, Timor Leste, Abepura, dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM mengalami stagnasi, tak ada satupun kasus HAM masa lalu dituntaskan; peristiwa 1965/1966, Tanjung Priok 1984, Talang Sari 1989, Penculikan Aktifis 1997/1998, Penembakan mahasiswa di Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS), Mei 1998, Pembunuhan Munir, Alas Tlogo, Lumpur Lapindo dll merupakan cermin bahwa negara tidak menghargai HAM. Padahal, Indonesia memiliki posisi strategis di kancah Internasional dengan menjadi Anggota Dewan

HAM PBB dan menjadi Anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Seharusnya Indonesia menjadi contoh dalam rangka memajukan dan menegakan HAM.

Negara harus memberikan jaminan agar pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim orde baru tidak terulang kembali. Solusinya Bapak Presiden harus berani menghukum semua pelaku kejahatan HAM. Tidak hanya itu, negara harus segera memulihkan hak-hak korban yang sudah menderita terlalu lama. Sejarah masa lalu menjadi cermin masa kini untuk melangkah ke arah Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu harus segera dituntaskan, apabila Yang Terhormat Bapak Presiden masih mencintai negara ini. Jika tidak, demokrasi dan penegakan HAM yang selama ini dicita-citakan hanyalah tinggal sekadar mimpi.

Jakarta, 25 Oktober 2007

Salam,
Presidium JSKK,

Sumarsih
081316638655

Suciwati
0818159146

Bejo Untung
08176916545